

**ANALISIS FAKTOR KESIAPAN PEMERINTAH DALAM
MENERAPKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL**

(Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir)

Oleh:

Norfaliza

Pembimbing: Taufeni Taufik dan Eka Haryani

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email: nurfalizaica@yahoo.co.id

*Government Readiness Factor Analysis In Applying Accounting For Government
Accrual*

(Empirical Study on the Rokan Hilir District SKPD)

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of the human resources, organizational commitment, support device on the readiness of the implementation of the accrual-based government accounting standards. The population in this study is the Head of finance and financial staff who work on the entire SKPD Rokan Hilir. The sampling technique using purposive sampling method. The number of respondents in this study were 58 respondents. The data of this study uses primary data directly through a questionnaire and analyzed using SPSS 20. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach. Adjusted R-square test results obtained at 0.753 or 75.3%, this means that the contribution of independent variables influence the dependent variable was 75.3%. While the remaining 24.7% can be explained by other factors that are not disclosed in this study, such as communication, skills, behaviors and others.

Keywords : Accrual-based, government, accounting, human resources, and commitment.

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian berlanjut ketika pemerintah kembali melakukan perubahan yang fundamental pada bidang keuangan negara pada tahun 2003 dan ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices*.

Sejak 22 Oktober 2010 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 mengenai hal yang sama.

PP No.71 Tahun 2010 adalah SAP berbasis akrual yaitu, menagaku pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengaku pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah memiliki kekuatan hukum.

Penerapan SAP Berbasis Akrual bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Implementasi harus dilakukan secara hati-hati dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrual sangat diperlukan agar pemerintah mampu meng-hasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Adanya perbedaan antara SAP Berbasis Kas dan SAP Berbasis Akrual membuat peran sumber daya

manusia menjadi vital. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Namun Enho (2008), menyatakan bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Hal ini tentunya menjadi tamparan keras bagi pemerintah karena ternyata SDM yang mereka miliki bahkan belum memahami SAP Berbasis Kas apalagi untuk memahami SAP Berbasis Berbasis Akrual. Padahal Ardiansyah (2013) menyimpulkan SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP Berbasis Akrual. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan antara lain melalui peningkatan MSDM yang profesional.

Faktor selanjutnya adalah Komitmen Organisasi, dalam hal ini adalah komitmen dari Pemerintah Daerah. Komitmen dari Pemerintah Daerah merupakan keinginan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Komitmen merupakan hal yang penting dalam penerapan suatu peraturan sebagaimana yang dinyatakan oleh Azhar (2007), “Komitmen dari anggota organisasi akan mempercepat keberhasilan penerapan peraturan tersebut. Selain itu, dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci

keberhasilan dari suatu perubahan dari pemerintah (Sulani, 2010).

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah perangkat pendukung teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Ketersediaan komputer (*hardware*) dan program-program akuntansi pemerintahan (*software*) akan sangat membantu SKPD dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menerapkan SAP. Besarnya peran dari perangkat pendukung ini telah dibuktikan oleh Azhar (2007) dan Sulani (2010) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa perangkat pendukung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan suatu peraturan.

Penelitian ini mengacu pada tiga penelitian terdahulu, yaitu penelitian Azhar (2007), Aldiani (2010), dan Ardiansyah (2013). Azhar (2007) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri No.13 Tahun 2006. Sedangkan Aldiani (2010) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 dan Ardiansyah (2013) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan PP No.71 Tahun 2010.

Karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam metode pengukuran akuntansi dari basis kas ke basis akrual, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual. Diharapkan, dengan penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam

proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sejauh mana sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan kabupaten rokan hilir.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi dan perangkat pendukung mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis Akrual.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Kieso dkk (2008) basis akuntansi akrual (*accrual basis of accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Sumber Daya Manusia

Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007), sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Menurut Nawawi (2001, 8) dalam Aldiani (2009), ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu:

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
- b. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

Komitmen Organisasi

Menurut Herris B. Simandjuntak (2005; 1) dalam Azhar (2008) komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2007) dalam Aldiani (2009) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi tidak ada berhubungan dengan bakat,

kemampuan atau kecerdasan, tetapi komitmen berhubungan dengan perasaan memiliki atau cinta terhadap organisasi dan rela mengorbankan keinginan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka apapun pekerjaannya akan sulit terlaksana.

Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung adalah seperangkat alat-alat tambahan yang digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Perangkat pendukung berfungsi untuk memudahkan dan membantu seseorang, kelompok, ataupun organisasi dalam melakukan pekerjaan dan mencapai tujuan. Peran perangkat pendukung tidak bisa diremehkan, walaupun terkadang hanya dianggap sebagai pelengkap. Keberadaannya seperti kepingan *puzzle* terakhir yang akan menyempurnakan susunan *puzzle* itu sendiri.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah telah mengeluarkan PP No.71 Tahun 2010

yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan diterapkan pada tahun 2015. Dalam rangka upayakesiapan dan pencapaian tujuan tersebut maka Pemerintah harus dapat mempersiapkan diri dalam hal membenahi sumber daya manusianya dengan cara memberikan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan bimtek. Dengan begitu akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten sehingga proses transisi menuju SAP Berbasis AkruaI bisa berjalan dengan lancar dan mulus serta juga akan dapat melaksanakan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP Berbasis AkruaI dengan baik.

Penelitian tentang pengaruh sumber daya manusia pernah diteliti oleh Kusuma (2013) dan Ardiansyah (2013) yang menemukan adanya pengaruh positif dari sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI.

H₁: Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI

Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu/kelompok untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan individu ataupun kelompok.

Pegawai pemerintahan yang memiliki komitmen tinggi akan bekerja dengan optimal dan maksimal karena mereka menginginkan kesuksesan organisasi

dimana mereka bekerja. Pegawai pemerintahan yang berkomitmen tinggi tentunya akan mematuhi setiap peraturan atau perubahan yang terjadi dalam organisasi tempat mereka bekerja termasuk saat Pemerintah memutuskan akan menerapkan SAP Berbasis AkruaI setelah sebelumnya menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI. Mereka dengan sepenuh hati akan mempelajari, memahami atau menghayati penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP.

Selain itu dengan adanya komitmen yang kuat, mereka juga akan bekerja dengan keras dan ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya yang nantinya akan berujung pada meningkatnya kinerja dan tercapainya tujuan organisasi. Dengan kuatnya komitmen yang dimiliki SKPD dan pegawai maka penerapan SAP Berbasis AkruaI akan berjalan lebih mudah.

Penelitian tentang pengaruh komitmen pernah diteliti oleh Azhar (2007), Sulani(2009) dan Ardiansyah (2013) yang menemukan bahwa adanya komitmen berpengaruh terhadap variabel dependen.

H₂:Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI

Pengaruh Perangkat Pendukung terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI

Memasuki era modernisasi, pemerintah dan swasta mulai menggunakan komputer dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini tidak berlebihan karena dengan penggunaan komputer, efektivitas dan efisiensi kerja mengalami peningkatan. Pemerintah dalam melakukan pelaporan keuangan juga sudah menggunakan berbagai

aplikasi program yang ditawarkan untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan dengan adanya ini, maka diyakini akan mem-permudah SKPD dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan SAP Berbasis Akrua. Ketersediaan *hardware* dan *software* juga akan membuat penerapan SAP Berbasis Akrua berjalan dengan sempurna karena didukung oleh perangkat pen-dukung yang layak dan memadai.

Penelitian tentang pengaruh perangkat pendukung pernah diteliti oleh Azhar (2007) mengenai pengaruhnya keberhasilan penerapan Permendagri 13 dan Sulani (2010) mengenai pengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan mengenai pengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 yang menemukan bahwa perangkat pendukung memiliki pengaruh yang signifikan.

H₃:Perangkat Pendukung Berpengaruh Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang berada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Anggota populasi yang menjadi sampel adalah pegawai negeri sipil Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi kepala dan staf sub bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan SKPD Kabupaten Rokan Hilir.

Prosedur pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pengumpulan data primer, yaitu kuisisioner. Kuisisioner yang telah terstruktur dibagi secara langsung kepada responden untuk diisi. Seluruh kuisisioner terdiri dari 58 buah akan dibagikan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Masing-masing SKPD mendapat 3 buah kuisisioner yang ditujukan kepada kepala bagian umum dan kepegawaian serta kepala bagian keuangan di SKPD

Satistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik non parametrik dimana dengan menggunakan skala pengukuran ordinal. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut.

Pengujian Data

Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Pengujian reliabilitas berguna untuk mengetahui apakah instrumen yang dalam hal ini

kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Umar, 2000). Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien cronbach's alpha dengan bantuan software SPSS. Cronbach's Alpha merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki cronbach's alpha $> 0,6$

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan permasalahan, tujuan, kerangka konsep dan hipotesis dalam penelitian ini, selanjutnya dikembangkan model analisis berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Persiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua

X1 = Sumber daya manusia (SDM)

X2 = Komitmen

X3 = Perangkat Pendukung

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Error

Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov Test. Suatu data dikatakan

berdistribusi secara normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari α 5%. (Umar:2000 dalam ariyani;2013)

Pengujian Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Menurut Erlina (2011) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Ada dua uji multikolinieritas yang sering digunakan yaitu dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas harus menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan memiliki nilai VIF antara 1-10 dan nilai tolerance lebih dari 10% (0,1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila direntang 1-10 tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel yang digunakan. Sedangkan semakin tinggi VIF, semakin berat dampak dari multikolinieritas. Pada umumnya jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinieritas yang cukup berat di antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual

suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Menurut Erlina (2011) model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser. Suatu data dikatakan terbebas dari penyimpangan heterokedastisitas apabila secara statistik variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dasar Pengambilan Keputusan:

- Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai r_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
- Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai r_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah :

1. jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan), atau apabila tingkat $sig > \alpha$ 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (ada pengaruh yang signifikan), T tabel dilihat dengan derajat bebas = $n - k - 1$, atau apabila tingkat $sig < \alpha$ 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Rokan Hilir merupakan Ibu Kota Bagasiapi-api, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. maka mulai berpacu mengejar segala bentuk keteringgalan dan keterbelakangan

yang selama ini menyelimuti segala sektor kehidupan.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variable-variabel penelitian seperti kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sumber daya manusia, komitmen organisasi, perangkat pendukung untuk variabel-variabel penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2
Descriptive Statistics
Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Ma xim um	Me an	Std. Deviat ion
Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	50	11.00	20.00	15.9800	2.21765
Sumber Daya Manusia	50	12.00	25.00	18.5800	2.76339
Komitmen Organisasi	50	7.00	20.00	13.0400	3.3500
Perangkat Pendukung	50	8.00	20.00	15.3600	2.84110
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data Hasil Olahan, 2015

Berdasarkan pengujian statistik diketahui Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual mempunyai nilai minimum 11,00 dan nilai maksimum 20,00. Mean 15,9800 dengan standar deviasi 2,21765. Sumber daya manusia mempunyai nilai minimum 12,00 dan nilai maksimum 25,00. Mean 18,5800 dengan standar deviasi 2,76339. Komitmen organisasi mempunyai nilai

minimum 7,00 dan nilai maksimum 20,00. Mean 13,0400 dengan standar deviasi 3,35005. Perangkat pendukung mempunyai nilai minimum 8,00 dan nilai maksimum 20,00. Mean 15,3600 dengan standar deviasi 2,84110.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan SPSS 17.0, terlihat bahwa data tersebar dise-kitar garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persya-ratan normalitas data dapat ter-penuhi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

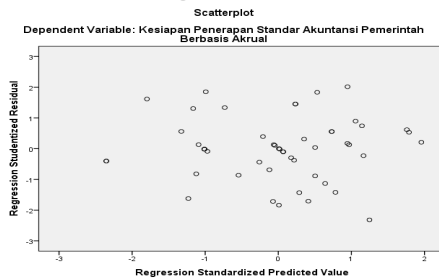
Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas, diperoleh bahwa untuk setiap variabel inde-pendennya memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inde-penden tidak mengalami gangguan multikolinieritas.

Hasil Uji heteroskedasitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas

Gambar 1
Hasil uji Heterokedasitas



Sumber: Olahan Data SPSS

Berdasarkan gambar diatas dari hasil uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa data tersebar dan tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda :

$$Y = 2,095 + 0,154X_1 + 0,212X_2 + 0,537X_3 + e$$

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,753. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 75,3%. Sedangkan sisanya 24,5% dipengaruhi oleh variabel lain seperti komunikasi dan lain-lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,229 > 2,013$ dan $\text{sig.}t(0,031) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu sumber

daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Dalam penelitian ini, sumber daya manusia mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, ini berarti apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga proses transisi menuju SAP Berbasis Akrua bisa berjalan dengan lancar dan mulus serta juga akan dapat melaksanakan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP Berbasis Akrua dengan baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Ardiansyah (2013) yang mengemukakan bahwa SDM berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,227 > 2,013$ dan $\text{sig.}t(0,000) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Hal ini mengindikasikan bahwa SKPD Kabupaten Rokan Hilir akan berkomitmen secara penuh dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma (2013) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember). Hal ini dimungkinkan terjadi, karena komitmen organisasi akan mempunyai pengaruh pada saat penerapan SAP berbasis akrual yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,136 > 2,013$ dan $\text{sig.}t(0,000) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu perangkat pendukung berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perangkat pendukung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Azhar (2007), namun bertentangan dengan hasil penelitian Warisno (2009) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan Kinerja.

Perangkat pendukung dianggap sangat mempengaruhi dalam pencapaian kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, karena di dalam pengelolaan Laporan Keuangan, seluruh SKPD benar-benar mengandalkan perangkat pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi, meskipun anggota atau

staff yang mengelola laporan keuangan tersebut tidak didukung dengan latar belakang akuntansi, mereka dapat melakukannya karena bantuan perangkat lunak yang telah dimiliki. Sebagaimana yang diutarakan Kenneth dan Jane (2005) bahwa Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah agar berjalan secara efektif maka diperlukan sarana pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sumber daya manusia, komitmen organisasi dan perangkat pendukung terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel perangkat pendukung berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Rokan Hilir.
4. Hasil pengujian *Adjusted R square* diperoleh sebesar 0,753 atau 75,3 %, hal ini berarti bahwa

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 75,3%. Sedangkan sisanya 24,7 % dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diungkapkan dalam penelitian ini, seperti komunikasi, keterampilan, perilaku dan lain-lain.

Keterbatasan

Penelitian ini masih banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu Kabupaten. Sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesiapan pemerintah dalam menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang dapat digunakan hanya 50 dari seluruh kuesioner yang disebarkan (58). Hal ini disebabkan banyaknya responden yang tidak terlalu peduli terhadap pengisian kuesioner karena kesibukan dan keterbatasan waktu yang mereka miliki sehingga beberapa kuesioner ada yang hilang bahkan tidak diisi.
3. Peneliti tidak mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuesioner karena keterbatasan waktu sehingga responden tidak bisa menanyakan langsung terhadap pertanyaan yang tidak dimengerti.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perludilakukan penelitian yang lebih luas.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variable independen, yaitu sumber daya manusia, komitmen organisasi dan perangkat pendukung. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat me-nambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, seperti variabel motivasi, budaya organisasi, regulasi serta komunikasi.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010*. Jurnal.
- Azhar, 2007. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Penerapan Permendagri 13 (Studi pada pemerintah Kota Langsa)*. Tesis.
- Bastian, Indra, 2005. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Enho, Yohannes. 2008. *Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Latar Belakang Pendidikan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan*. Skripsi
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Skripsi
- Fauziah. 2010. *Pengantar Teknologi Informasi*. Muara Indah. Bandung.
- Ghozali, Imam (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima)*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Ghulam, Rhumi. 2012. *Mencari Batu Pijakan Bagi Akrualisasi Sektor Publik Di Indonesia (Studi Atas Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Nepal, Hong Kong Dan Selandia Baru)*.
- Hadi, Abdul, Muhammad Syam Kusufi, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta*
- Handoko.T. Hani. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta.
- Hardiansyah, 2013. *Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Gave Media, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Herlina, Hetty.2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010*.Jurnal
- Irianto, Jusuf. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia: Pengantar Pengembangan Model MSDM Sektor Publik*, Vol 24, No.4, Hal 281-291.
- Kusuma, Ririz Setiawati., 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Skripsi
- KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- Mondy R. Wayne. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jilid 1 Edisi 10, Erlangga, Jakarta
- Mulyono. 2007. "Struktur Hardware Komputer", *Jurnal struktur Komputer*, Vol.3, No.1, Hal 6-7.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah*

- Nomor/24/2005 tentang
*Standar Akuntansi
Pemerintahan.*
- Republik Indonesia, 2010. Peraturan
Pemerintah
Nomor/71/2010 tentang
*Standar Akuntansi
Pemerintahan.*
- Republik Indonesia, 2000. Peraturan
Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil
- Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 tahun 2003
tentang *Keuangan
Negara*
- Sibagariang, Arisonaldi.2008.
*Pengaruh Kualitas
Sumber Daya Manusia,
Komunikasi, Sarana
Pendukung Dan
Komitmen Organisasi
Terhadap Kinerja
SKPD.*Jurnal
- Siagian, Sondang P., 1994.
*Manajemen Sumber
Daya Manusia,* Bumi
Aksara, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi
Penelitian Untuk Bisnis.*
Salemba Empat. Jakarta
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan
R&D.* Alfabeta, Jakarta
- Sulani, Aldiani., 2009. *Faktor-
Faktor Pendukung
Keberhasilan Penerapan
Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 2005 Pada
Pemerintahan Kabupaten
Labuhan Batu.* Skripsi
- Umar, Husein.2008. *Metode
Penelitian untuk Skripsi
dan Tesis Bisnis,* PT.Raja
Grafindo Persada,
Jakarta.
- Warisno, 2009. *Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Kinerja
Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jambi.* Tesis
- Witantri, Ajeng. 2012. *Faktor-faktor
pendukung keberhasilan
penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Kota Medan.*
Skripsi.
- Yafie, M.Dhairolly. 2013.
*Penerapan Basis Akrual
Pada Standar Akuntansi
Pemerintahan Indonesia.*
Jurnal